

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Teoritis	18
1.4.2 Manfaat Praktis	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	20
2.1.2 Teori Perjanjian	26
2.1.4 Teori Keadilan Legalitas dalam Hukum Perpajakan	30
2.2 Landasan Konseptual	33
2.2.1 Konsepsi Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas (PSC)	33
2.2.2 Konsepsi Participating Interest (PI)	35
2.2.3 Konsepsi Perpajakan atas Investasi Lintas Batas	38
2.2.4 Konsepsi Pemajakan PI di Indonesia	42
BAB III METODE PENELITIAN	46

3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis Data.....	46
3.2.1 Bahan Hukum Primer	46
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	49
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	51
3.3 Cara Perolehan Data	54
3.4 Jenis Pendekatan	56
3.5 Analisa Data	58
BAB IV_HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Batasan Pembahasan.....	62
4.2 Analisa atas Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Menegenai Pajak atas Pengalihan PI pada Kontrak Bagi Hasil Migas di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Dalam Investasi di Sektor Migas. 67	
4.2.1 Subjek Pajak dalam Pengalihan PI.....	72
4.2.2 Objek Pajak dalam Pengalihan PI	84
4.3 Kajian Permasalahan terkait dengan Norma Pengaturan dan Penerapan Pajak atas Pengalihan <i>Participating Interest</i> dan Menawarkan Konsep Solusi yang Relevan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum.	89
4.3.1 Penerapan Pajak Pengalihan atas <i>Participating Interest</i> dan Tantangan Kepastian Hukum Sektor Migas Indonesia.....	90
4.3.2 Konsep Solusi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum	93
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Linimasa jenis kerjasama pada industri minyak dan gas bumi di Indonesia.	6
Gambar 2 -Pengalihan langsung PI (direct transfer)	65
Gambar 3 - Pengalihan tidak langsung PI melalui saham (indirect transfer).....	66
Gambar 4 - Contoh Struktur Perusahaan Energi sebagai Perusahaan Publik	76
Gambar 5 - P3B dan Model Perlakuan Perpajakan Lintas Batas atas Pengalihan Aset Tidak Langsung	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perbandingan Peraturan Perpajakan atas Pengalihan PI	69
Tabel 2 - Praktik Pajak Pengalihan Aset Lintas Batas di Beberapa Negara	88
Tabel 3 -Ringkasan Masalah dan Solusi	94



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH



APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEPS	:	<i>Base Erosion and Profit Shifting</i>
BKF	:	Badan Kebijakan Fiskal
BW	:	<i>Burgerlijk Wetboek</i> (dalam KUHPerdata)
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUT	:	Bentuk Usaha Tetap
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FDI	:	<i>Foreign Direct Investment</i> (Investasi Asing Langsung)
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
KBH	:	Kontrak Bagi Hasil
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KUHPerdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MIDA	:	<i>Malaysian Investment Development Authority</i>
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MLI	:	Multilateral Instrument
MTC	:	<i>Model Tax Convention</i>
NBW	:	<i>Nieuw Burgerlijk Wetboek</i> (dalam KUHPerdata)
NNPC	:	<i>Nigerian National Petroleum Corporation</i>
OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OIT	:	<i>Offshore Indirect Transfers</i>
PI	:	Participating Interest
PIA	:	<i>Petroleum Industry Act</i>
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PP	:	Peraturan Pemerintah
P3B	:	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i> (Kontrak Bagi Hasil Migas)
PT	:	Perseroan Terbatas
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SDA	:	Sumber Daya Alam
SKKMIGAS	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	:	Undang-Undang
UU Migas	:	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
UN	:	<i>United Nations</i>
WBG	:	<i>World Bank Group</i>
WPLN	:	Wajib Pajak Luar Negeri

